

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Sebagai provinsi yang relatif masih sangat muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan.

Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat di dayagunakan, dan di manfaatkan secara optimal untuk dijadikan modal dalam mengatasi berbagai tantangan, ketertinggalan dan setiap permasalahan yang timbul. Pertimbangan pendirian Provinsi Banten menurut Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang.

Adanya kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, karena meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat. Dan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Dengan kurun waktu 11 tahun daerah otonom baru Provinsi Banten, telah mengalami perkembangan signifikan.

“H.Tb.Aat Syafaat mantan Walikota Cilegon dan tokoh Banten.“Provinsi Banten yang sudah berusia 11 tahun sudah banyak kemajuan yang dicapai, walaupun masih ada kekurangan kata Aat Syafaat. Ia mengatakan, salah satu prestasi dan keberhasilan yang nampak untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu Banten meskipun baru 11 tahun tetapi sudah bisa sejajar dengan provinsi lainnya. Selain itu, keberhasilan yang diraih Pemerintah Provinsi Banten yakni meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun ini mencapai Rp2,3 triliun”.²

Berbagai penilaian atas keberhasilan itu, tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Banten, beserta komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam mencapai citi-cita pembentukan Provinsi Banten, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selama sebelas tahun Provinsi Banten berdiri, tidak sedikit keberhasilan yang diraih baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Berbagai keberhasilan tersebut, telah mengubah wajah Banten menjadi provinsi yang mandiri, modern dan memiliki daya saing ditingkat nasional.

Pada dasarnya Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada hakekatnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten memberikan dana hibah sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela).

¹ . [http: potensidaerah.ugm.ac.id](http://potensidaerah.ugm.ac.id) diakses pada 1 maret 2012 pukul 12.45 wib

² . www.humasprotokol.bantenprov.go.id diakses pada 23 Desember2011 pukul 10.00 wib

“Hibah sendiri adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali”³

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD, Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.⁴

Dana hibah sendiri digunakan untuk Pembangunan di Provinsi Banten, tapi berbagai media cetak lokal maupun nasional, memberitakan dana hibah yang cenderung negatif. Sehingga diperlukan penanganan pemberitaan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Banten, peranan penanganan berita negatif tersebut biasanya dilakukan oleh *public relations*.

Menurut IPRA *publik relations*, adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama. melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana

³. www.djpk.depkeu.go.id diakses pada 1 maret 2012 pukul 12.30 wib

⁴. *Ibid*

utama”.⁵ *public relations* lebih dikenal dengan nama humas, di Pemerintah Provinsi Banten tapi perannya sama dengan *publik relations*. Humas di Provinsi Banten, merupakan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah.⁶

“Humas pemerintahan merupakan segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi/ pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya”.⁷

Humas pemerintah memiliki fungsi, yang tercantum dalam Panduan Umum Humas Pemerintah Bab II pasal 6 adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.⁸

Fungsi humas dilakukan dalam penanganan pemberitaan negatif dana hibah, berupa klarifikasi berita. seperti di website Humas Pemprov Banten tentang Pemberitaan tentang, “Pedagang Minta Dana Hibah” yang diberitakan oleh Harian Umum Baraya Post, tanggal 07 Oktober 2011 diklarifikasi oleh Pemprov Banten melalui Biro Humas dan Protokol terkait isi pemberitaannya.

⁵ . Maria Asumpta Rumanti. 2002. *Dasar-dasar Public Relations*. Jakarta. PT. Gramedia Widasarana Indonesia. hal. 12

⁶ . <http://potensidaerah.ugm.ac.id> diakses pada 1 maret 2012 pukul 12.45 wib.

⁷ . Kode etik humas Pemerintah Bab I Pasal I no 6.

⁸ . Bakohumas. 2008. *Panduan Umum Humas Pemerinta*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. hal 6

Dalam hal ini, Kepala Biro Humas dan Protokol, Komari menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pemerintah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan hibah kepada kelompok sosial berdasarkan seleksi ketat dan tidak mengikat. sejalan dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung.

Selain itu, ia menyatakan pemerintah selalu menerima dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat perorangan ataupun organisasi/lembaga yang memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten. termasuk para pedagang yang mengusulkan bantuan hibah. Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan seleksi ketat secara akuntabel dan transparan dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan dana hibah,” ujarnya.⁹

Penanganan pemberitaan dana hibah dari media tersebut, oleh Humas supaya tidak ada lagi pemberitaan dana hibah. Tapi pemberita negatif dana hibah terus ada dan cenderung negatif, walaupun sudah dilakukan penanganan berita negatif oleh humas. Hampir Semua media lokal maupun nasional memberitakan negatif dana hibah pada tahun 2011, seperti harian nasional Pikiran Rakyat judulnya “Ulama Desak KPK Periksa Atut”.¹⁰

Kemudian ada berita di harian lokal Baraya Post judulnya “KPK Diminta Tangani Dana Hibah”,¹¹ sehingga tindakan dari humas sejauh mana. supaya pemberitaan tersebut tidak terlalu menjadi negatif karena berita negatif dana hibah

⁹. www.humasprotokol.bantenprov.go.id diakses pada 23 Desember 2011 pukul 10.00 wib.

¹⁰. Berita Pikiran Rakyat. *Ulama Desak KPK Periksa Atut*. Jumat 25 November 2011

¹¹. Berita Baraya Pots. *KPK Diminta Tangani Dana Hibah*. 15 September 2011

ini terus ada, hal ini menarik peneliti untuk melaksanakan penelitian penanganan pemberitaan negatif. Karena dalam penanganan pemberitaan tersebut, ada tindakan humas berupa manajemen penanganan pemberitaan negatif dan hibah. manajemen itu ada dalam strategi, karena strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan.¹²

Strategi sendiri menurut Bennet, sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.¹³ Pengertian strategi diungkapkan juga oleh Anwar Arifin, sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.¹⁴ Sehingga manajemen strategi berdasarkan Willian F. Glueck-Lawarence R. Jauch merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi, atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Proses manajemen strategi ialah suatu cara dengan jalan bagaimana para perencana strategi menentukan sasaran untuk membuat kesimpulan strategi.

Secara tidak langsung definisi manajemen strategi adalah memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha perusahaan.¹⁵ Menurut Mc Elreath. manajemen strategi PR atau humas berarti penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian suatu

¹² . Sandra Oliver. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pertama. hal. 2.

¹³ . Onong Uhjana Effendy. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hal. 32

¹⁴ . Anwar Arifin. 2007. *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung : CV. Armico. hal. 59

¹⁵ . H. Djaslim Saladin, SE. 2003. *Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan*, Bandung, Linda karya. hal 4 dan 5

kegiatan komunikasi.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?”

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah maka studi kasus ini, menggunakan tahap dan perencanaan strategi berdasarkan Smith, supaya peneliti fokus dan dapat menggambarkan lebih jelas manajemen strategi PR, dalam penanganan pemberitaan negatif dana hibah dalam suatu perencanaan strategi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten sehingga identifikasinya adalah:

1. Bagaimana *Formative Research Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus

¹⁶ . Yosai Iriantara. 2004. *Manajemen Strategis Public Relations*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hal 74

Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?

2. Bagaimana *Strategy Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?
3. Bagaimana *Tactic Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?
4. Bagaimana *Evaluative Research Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Formative Research Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?

2. Untuk mengetahui *Strategy Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?
3. Untuk mengetahui *Tactic Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?
4. Untuk mengetahui *Evaluative Research Phase*, dalam Manajemen Strategi PR Dalam Penanganan Pemberitaan Negatif Pemprov Banten (Studi Kasus Perencanaan Strategi Penanganan Berita Kasus Dana Hibah Oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten)?

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan memberikan sumbangsih wawasan baru dalam ruang lingkup ilmu komunikasi, juga diharapkan dapat memberi rangsangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan melengkapi serta memberi kritik yang membangun bagi penelitian ini. Terlebih, penelitian dalam bidang ilmu

komunikasi dan ilmu kehumasan, mengenai manajemen strategi PR dalam penanganan pemberitaan negatif jarang dilakukan.

Dengan demikian, hasil penelitian dalam kajian ini semakin kaya dan semakin sempurna. Sehingga dijadikan sebagai bukti bahwa suatu penelitian tentang manajemen strategi PR memiliki signifikansi dalam hal teori dan metodologi sebagai fenomena komunikasi.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten dalam penanganan pemberitaan negatif Pemprov Banten.